

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia yang menempati bumi terkotak-kotak kedalam berbagai suku, ras dan agama yang berbeda-beda (banyak agama). Oleh karenanya kata agama selalu tampil dalam bentuk plural (*religions*). Berangkat dari kenyataan ini, membayangkan hanya ada satu agama kehidupan di dunia ini agaknya hanya merupakan ilusi belaka.

Perubahan pola pikir manusia menurut Ridwan Lubis (2003:XV) di era industri dan globalisasi ini dirasa akan semakin transparan, termasuk dalam sekat agama dan budaya. Maka perlu di sadari, ada dua bentuk pendekatan terhadap keberagamaan manusia yaitu pendekatan yang bersifat imani (*beliver*) dan pendekatan Ilmiah .

Pendekatan imani sering bercorak apriori sarat dengan klaim kebenaran ada di pihaknya, sedang pendekatan historis relatif lebih terbuka (*opened*). Penyiaran dua bentuk itulah umat beragama menyampaikan ajaran agamanya dengan melalui interpretasi masing-masing, tentunya dalam mengadakan interpretasi itu teradapat hal yang absolut dan ada yang nisbi kebenarannya, seiring dengan keterbatasan masing-masing selaku manusia (Soeipto W, 1991:x)

Dari waktu ke waktu cara pandang itu berpengaruh terhadap penyiaran agama dan senantiasa dijalankan para pemeluknya termasuk di Kota Medan. Selanjutnya BPS Kota Medan (2002 : 122) menerangkan bahwa jumlah penduduk Medan ada sebanyak 1.910.703 jiwa dan sangat pluralis baik dari sudut etnis, budaya agama bahasa dll. Adapun gambaran agama penduduk Medan dari yang terbanyak berturut turut dari, penganut Islam, Kristen Protestan, Katolik , Budha , Hindu dan lain-lain, dan kehidupan beragama tergolong dinamis bagi pemeluknya

Pendapat ini berjalan menurut alur logika bahwa yang beragama adalah manusia, sementara manusia adalah makhluk yang berbudaya yang tidak mungkin luput dari pengaruh dan jaring-jaring kebudayaan dalam prilakunya. Hal ini berarti pula bahwa setiap agama berikut segala sosio kulturalnya, seperti rumah ibadah, lembaga keagamaan, tokoh agama, cendekiawan agama seharusnya harus menampilkan gerak atau dinamika yang bersifat "sentripetal" yaitu suatu gerak yang mengarah pada titik sentral atau sumber gerakan persatuan dan kerukunan (*inklusi*).

Implikasinya, praktek keberagamaan baik secara individu atau kelompok senantiasa melahirkan bentuk-bentuk plural, bahkan melahirkan pengelompokan-pengelompokan. Hal ini menyebabkan praktek keberagamaan bila dilihat secara *sosiologis-horizontal* selalu memunculkan wajah ganda; di satu sisi ajaran agama dapat bertindak sebagai kekuatan *integrasi*. Agama mampu menciptakan ikatan kohesi (kepaduan) sekelompok masyarakat, dan pada waktu yang sama ia menciptakan pemisahan dari kelompok lain (*disintegrasi*).

Pluralistik kehidupan seperti digambarkan diatas juga telah menjadi ciri bangsa kita. Pluralitas tersebut, khususnya dalam kehidupan beragama, dalam konteks kesejarahan bangsa telah menunjukkan implikasinya yang positif berupa sumbangan para pemeluk agama bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Apalagi partisipasinya dalam pembangunan nasional.

Sebagaimana diketahui bahwa agama dalam kehidupan umat manusia merupakan sesuatu yang fundamental dan fungsional pula, baik sebagai fungsi spritual, fungsi sosiologis, maupun fungsi psikologis. Fungsi seperti kita ketahui mempertahankan (keutuhan) masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk kelangsungan hidup inklusif dan pemeliharaannya secara maksimal. Meskipun kadang-kadang dalam memenuhi kebutuhan tersebut timbul berbagai kontradiksi /konflik.

Dalam kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat dan pemeliharaannya, agama membantu mendorong terciptanya; 1). Persesuaian mengenai sifat dan tanggungjawab, 2). Menciptakan sistem nilai terpadu dan utuh

dalam pembangunan, 3). Memberi kekuatan dalam mendukung dan memperkuat adat istiadat yang berbeda dan berlaku baik secara keseluruhan maupun sebagiannya.

Yang menjadi fungsi pokok agama bagi manusia dapat dijelaskan diantaranya ; a). Integrasi kepribadian manusia, b). Integrasi Masyarakat Sosial, c). Integrasi unit-unit manusia yang berpecah-pecah menjadi ras, warna kulit bahasa, budaya dan lain-lain. Dari fungsi-fungsi tersebut ia dapat melahirkan perkembangan individu dan masyarakat dalam bentuk suatu kerukunan.

Dari fungsi strategis agama tersebut perlu dijaga "kerukunan" (*toleransi* atau *tatsamuh*) dalam kehidupan beragama, agar norma agama itu dapat menjadi motivator dan dinamisator dalam mengisi kehidupan dan pembangunan. Kehidupan yang rukun adalah suatu corak hidup saling menghargai, saling menghormati dalam arti tidak saling menyalahkan dan tidak saling mengganggu sehingga tercapai gaya hidup rukun, namun dinamis.

(*Pluralis*) berarti keanekaragaman, semisal suku, agama dan golongan-golongan sosial lainnya. Ciri yang nampak adalah adanya kecenderungan kuat memegang identitas golongannya masing-masing. Orientasi kuat ke dalam golongan merupakan faktor yang mempertebal batas perbedaan dan merupakan isyarat mengenai pekanya hubungan antar golongan sosial maupun agama dalam masyarakat. Memang golongan sosial itu berguna agar setiap golongan dapat mengidentifikasi diri pada suatu ciri-ciri tertentu, tetapi tidak fanatik buta sebab hal itu akan menghambat pembangunan yang bersifat inklusif.

Bilamana landasan identitas suatu golongan adalah agama, sedang agama merupakan etos yang memberi bobot keyakinan kuat para penganutnya, maka batas-batas dan perbedaan sosial atau pertentangan dapat terjadi sebagai akibat dari doktrin agama yang diterjemahkan dalam kenyataan hidup budaya yang kompleks. Agama dan kebudayaan memang dapat dibedakan tapi tak terpisahkan karena keduanya terdapat dalam diri manusia. Aspek politik/kekuasaan misalnya, seringkali menjadi faktor yang turut serta mencampuri perbedaan agama dan budaya atau faham-faham yang menyertainya.

Meskipun agama merupakan identitas golongan dan ia mempunyai peranan dalam masyarakat sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat dan melestarikan, namun ia juga dapat muncul dalam fungsi lain, ia dapat menjadi penyebab terjadinya gejolak di antara golongan-golongan yang ada. Terutama pula bila terjadi perubahan besar sosial ekonomi, agama, penganutnya sering memainkan sikap reaktif inovatif bahkan reaksioner. "sejauh agama berhasil melaksanakan fungsi mempersatukan dan seberapa kuat ia bisa melahirkan perpecahan ternyata sangat berbeda-beda sepanjang sejarah dan tergantung pada keanekaragaman corak masyarakat" (Elizabeth, 1985:42).

Kenyataan sosial budaya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia termasuk Kota Medan adalah bangsa yang religius, bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sejarah bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan perkembangan agama-agama besar : Islam, Kristen (Katolik dan Protestan), Hindu dan Budha. Oleh karena itu "pertumbuhan dan perkembangan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai agamis, baik itu dilihat secara historis dan kulturil". (Proyek Pembinaan Hidup Beragama, 1982/1983 :1).

Agama yang diakui sebagai *Problem of ultimate* artinya suatu problema yang mengenal kepentingan yang mutlak, sehingga bagi orang yang sudah demikian dalam keterikatannya kepada agama yang dianutnya, ia akan berani mempertaruhkan segala yang dimilikinya untuk membela agamanya. Keterikatannya seperti itu tidak saja terbatas pada masalah hubungan pribadinya dengan Tuhan dalam bentuk ritual semata (*vertikal*). Tetapi menembus bidang-bidang lain lebih jauh dari itu, yang bersifat *horizontal* yakni hubungannya dengan sesama penganut agama.

Dalam konteks *horizontal* dapat dilihat bahwa kalau seseorang atau sekelompok penganut suatu agama bertemu dengan orang lain yang seagama akan lahir persaudaraan. Lalu persaudaraan seagama itu, pada gilirannya akan membentuk kelompok-kelompok yang lebih besar, yang mampu menembus kesukuan, kebangsaan dan geografi. Dari sini khusus di Indonesia melahirkan

lembaga-lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Gereja-Gereja Indonesia (DGI), Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI), Parisada Hindu Dharma (PHD) dan Perwalian Ummat Budha Indonesia (WALUBI) dan lain-lain. " Disini terlihat nyata bahwa agama dapat dipandang sebagai *integrative factor*, faktor pemersatu" (Galen M Vernon ; 1962 :274). Dan bahkan para filosof klasik semisal Aristoteles menganggap sudah semestinya bahwa homogenitas dalam beragama merupakan jaminan stabilitas politik. (RR. Al-Ford. 1972 :321). Aristoteles tampaknya memang benar, walaupun lingkungan yang sekuler dan profan meluas terus menerus dan seringkali mengorbankan dan mendesak lingkungan yang sakral. Pada umumnya memang kecendrungan skuler mempersempit ruang gerak kepercayaan-kepercayaan dan pengalaman-pengalaman kepercayaan. (Elizabeth :1985:60).

Namun sebaliknya, karena adanya keyakinan pada semua pemeluk agama terutama Islam dan Kristen bahwa mengajak manusia lain memeluk agamanya adalah misi tugas suci, maka muncullah kegiatan-kegiatan dakwah dan missionaris. Kalau masing-masing agama berhadapan dalam posisi seperti itu, niscaya konflik-konflik pun tidak mungkin dihindari lagi. Dilihat dari sisi ini Galen (1962:275) mengatakan bahwa agama disamping bisa di pandang sebagai *integrative factor* (faktor pemersatu) juga bisa menjadi "*disintegrative factor* (faktor pemecah kesatuan); .

Menyadari akan hal inilah maka dalam uraian penjelasan UUD 1945, disebutkan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna kewajiban pemerintah dan para penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur. Untuk mewujudkan amanat itu maka pemeliharaan budi pekerti kemanusiaan dan cita-cita moral yang luhur tidak dilepaskan dari usaha membina, membangun dan mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam operasionalnya. Amanat ini dilaksanakan pemerintah melalui Departemen Agama dan Departemen terkait dengan membina kerukunan hidup

beragama, yang oleh Alamsyah Ratu Prawira Negara diistilahkan dengan trilogi kerukunan "tiga kerukunan hidup beragama" yaitu :

1. Kerukunan intren umat beragama
2. Kerukunan antar umat beragama, dan
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah. (Dep. Agama, Agama dalam Pembangunan Nasional 1991 :9).

Dengan menyadari adanya berbagai macam kerukunan serta berbagai motivasi yang ditimbulkan dalam lingkungan hidup beragama, maka hal tersebut sangat penting artinya dalam membina dan membimbing rasa keagamaan pengikut agama sesuai dengan ajaran agama yang sebenarnya. Kemudian dengan mencari jalan atau cara yang lebih sesuai dengan pihak-pihak lain yang dicapai tanpa menimbulkan konflik yang tidak diinginkan dalam kehidupan.

Belum merupakan sasaran terakhir, apa yang disebut kerukunan, tetapi baru merupakan suatu "*conditio sine quanon*" (syarat yang harus ada) untuk mencapai tujuan yang lebih jauh yaitu situasi yang aman dan sejahtera. Situasi ini amat dibutuhkan semua pihak dalam masyarakat untuk memungkinkan penciptakan nilai-nilai spritual dan material yang secara simultan di butuhkan untuk mencapai tingkat kehidupan yang bermartabat.

Secara global dapat dikatakan bahwa, telah tumbuh suatu kesadaran yang semakin mendalam bahwa umat manusia dari tradisi keagamaan yang berbeda harus bertemu dalam kerukunan dan persaudaraan jauh dari pada permusuhan. Cita-cita diatas pada intinya memang merupakan ajaran fundamental dari setiap agama. Kiranya hal ini bukanlah sekedar cita-cita, tetapi tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diwujudkan dalam kenyataan oleh setiap agama. Kiranya hal ini bukanlah sekedar cita-cita tetapi tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diwujudkan dalam kenyataan oleh setiap agama. Adanya tugas yang suci ditemukan dalam setiap agama dan dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang berbeda baik kata-kata maupun nuansanya, namun sama hakekatnya. Sejalan dengan itu kiranya perlu dipahami kitab suci setiap agama, masing-masing ajaran mencerminkan sikap saling menghargai (*toleransi*).

Kasih sayang Tuhan dan keinginan Nya untuk menyelamatkan menjangkau seluruh umat manusia segala zaman, dari setiap bangsa dan negara, ari kepercayaan apapun juga. Jalan keselamatan yang diselenggarakan Tuhan sering dimengerti terlalu sempit oleh mereka yang menganut agama. Tetapi menurut ajaran agama keselamatan yang diberikan Tuhan itu diperuntukan bagi dunia ini baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, baik bersama-sama maupun perseorangan, dan mencakup semua kehidupan manusia. Keselamatan berarti kedamaian, baik bersama-sama maupun perseorangan, dan mencakup semua kehidupan manusia, dan pembebasan dari segala macam bentuk penindasan dan kezaliman.

Cita-cita keselamatan dan kedamaian itu tidak selalu menjadi kenyataan, sering terjadi permusuhan antar kelompok manusia, dan agama terkadang tersangkut dibelakangnya.

Tragedi konflik memang sering terjadi, seperti dikatakan Elizabeth (1992 :31), terutama terjadi di negara-negara yang pluralitas agamanya tinggi seperti di India, Afrika, Asia dan lain-lain. Sementara di Amerika Serikat, dimana perbedaan agama relatif tidak menimbulkan persoalan dari golongan penganutnya, bergaul secara terbuka dan berintegrasi. Sebenarnya keadaan seperti ini dijumpai pula di Indonesia seumpama pada Hari Raya Idul Fitri dan Natal, di antara umat yang terdiri dari penganut agama (Islam, Kristen Katolik, Hindu dan Kepecaryaan), bersama-sama mengikuti perayaan-perayaan keagamaan dari salah satu agama secara rukun, secara ganti berganti.

Namun di beberapa bagian dunia di mana terdapat pluralitas agama pertemuan yang sungguh-sungguh antar umat beragama amat minim dan hanya terbatas pada pertemuan yang dangkal sekedar memenuhi norma-norma sopan santun hidup sehari-hari. Jarang sekali dapat disaksikan orang yang berbeda agama, bertemusatu sama lain seperti manusia bertemu dengan manusia pada tingkat kejiwaan yang lebih dalam dari eksistensi manusia. Sedangkan justru kesadaran yang tulus itulah yang dituntut oleh agama. Jadi jelaslah masih terdapat tembok pemisah yang menghalangi pergaulan secara akrab diantara pemeluk

agama yang berlainan. Tembok pemisah itu antara lain disebabkan perbedaan agama dan kepercayaan. Dan hal itu bukannya tidak disadari pihak-pihak yang bersangkutan, tapi sulit dikendalikan.

Dalam pada itu dapat diungkapkan adanya suatu yang menggembirakan bahwa masih ada pihak-pihak tertentu di mana mereka tidak membiarkan rintangan itu berada terus menerus, artinya senantiasa ada usaha bersama-sama mencari jalan dari kesulitan ini, kemudian bersama menciptakan situasi hidup bersama yang bernafaskan kerukunan" (Mukti Ali, Agama dan Pembangunan Nasional :1991:15).

Sekarang ini kita hidup dalam suatu zaman di mana kerukunan merupakan kebutuhan, dengan alasan :Pertama, kita tidak hidup dalam masyarakat yang tertutup (eklusif) yang dihuni satu golongan pemeluk satu agama yang sama, tetapi dalam masyarakat yang modren di mana komunikasi dan hidup bersama dengan golongan yang beragama lain tidak dapat ditolak tetapi akan tetap menjadi kenyataan di lapangan. Dengan kata lain, kita hidup dalam masyarakat plural baik kepercayaan maupun kebudayaan. Kedua, Kalau keharusan untuk menciptakan masyarakat agama akan di kesampingkan atau tidak tidak dihiraukan, maka mau tidak mau kita dihadapkan pada situasi lain. Kita dituntut oleh situasi untuk bekerjasama dengan semua pihak agama untuk bersama-sama menjawab tantangan baru yang bersifat wilayah, nasional dan internasional antara lain ketidakadilan, terorisme, kewenangan, kemiskinan struktural, sekularisme kiri. Masalah ini semua merupakan amanah dari ajaran agama. Kesemuanya tidak dapat diatasi oleh golongan agama tertentu, tetapi membutuhkan konsolidasi dari segala kekuatan, baik moral, spiritual, maupun fisik dari semua umat beragama dan perangkat birokrasi yang tegas. Sekarang ini umat beragama mengalami ujian apakah umat beragama untuk membuktikan kepada dunia bahwa agama masih punya arti yang relevan bagi kepentingan pembangunan umat manusia dan dunianya atau tidak. Tentunya jawabnya dapat.

Jadi oleh karena itu pendapat sementara sekularisme seperti Nietzsche yang menyebutkan "Kedudukan agama dalam masyarakat akan diganti oleh sains modern" adalah tidak beralasan, bila di lihat dari realita peran agama.

Namun karena sifat semua agama yang dinamis berkembang bahkan harus dikembangkan, maka pluralistik tersebut disamping implikasinya yang positif terhadap pembangunan bangsa boleh jadi akan melahirkan titik rawan sebagai pemicu berbagai konflik, terutama apabila terjadi ketidakserasian dalam kehidupan yang plural itu.

Sejarah telah bercerita panjang kepada manusia pemeluk agama-agama bagaimana pun ketidakserasian kehidupan plural telah menjadi pemicu terjadinya sejumlah konflik di dunia dua puluh tahun terakhir, yang melibatkan orang-orang Islam dan bukan Islam. Di beberapa bagian dunia lainnya meningkat dan meluas pula konflik keagamaan, baik intra agama maupun antar agama. Konflik intra Islam terjadi antara Iran dan Irak, Irak dan Kuwait. Selain itu di Timur Tengah khususnya kawasan Pantai Timur Laut ; antara Yahudi melawan Muslim dan Kristen ; antara Kristen melawan Islam; antara Kristen lawan Kristen dan antara Muslim melawan Muslim Sunni, Syi'ah dan Drusz di Lebanon.

Di Asia Selatan konflik dengan warna keagamaan terjadi antara Hindu melawan Islam, Hindu lawan Katolik, Hindu lawan Sikh terutama di Punjab, Hindu lawan Budha yang tercermin di dalam pemberontakan kaum Budhist Gurkha di India sebelah Timur, dan Katolik antara Tamil lawan Sinhala di Srilangka. Di Indonesia sendiri terjadi konflik di Ambon antara Kristen dengan Islam yang hampir menjadi masalah nasional bila tidak diatasi secara bijaksana.

Untuk terealisasinya kerukunan itu, pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan dan menerbitkan surat keputusan diantaranya:

- Musyawarah Intern Umat Beragama
- Musyawarah antar umat beragama
- Pekan orientasi, sarasehan dan dialog kerukunan beragama
- Mengeluarkan sejumlah peraturan menyangkut penyiaran agama, pendirian rumah ibadah dan bantuan luar negeri.

- SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pembinaan kerukunan hidup beragama
- Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) 1996
- FKPA (Forum Komunikasi Pemuka Antar Agama), 1999

Meskipun demikian dalam tingkat tertentu sepanjang sejarah Indonesia masih berpapasan dengan sejumlah masalah dalam kehidupan beragama yang plural itu.

Untuk itulah pembinaan kerukunan hidup ummat beragama senantiasa ingin dikembangkan, apalagi jika dihubungkan dengan keadaan dunia yang semakin global saat ini, di mana agama-agama sedang memasuki era post modern, tentu diuntut suatu pengembangan yang lebih sistematis dan efektif dimasa depan, agar tetap memberi etos dalam membangun masyarakat inklusif untuk pembinaan diperlukan dua hal. Pertama, pengenalan menyeluruh terhadap kondisi objektif kerukunan hidup umat beragama yang ada saat ini di tanah air kita. Kedua, mengenali berbagai faktor penunjang dan penghambat dalam pembinaan kerukunan hidup beragama itu.

Menurut Ridwan Lubis (1994 :3) Propinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan adalah salah satu daerah yang memiliki kehidupan antar umat beragama yang " ter" dinamis dan variatif di Nusantara ini. Sesuai data BPS Medan (2002 :1). dinamika kehidupan beragama itu antara lain dilatar belakangi oleh perimbangan pemeluk agama (khususnya Islam dan Kristen) dalam berbagai aspek kehidupannya. Tidak heran daerah ini sering diklaim oleh Kristen sebagai salah satu kantong ummat Kristiani di Nusantara, sementara bagi umat Islam, daerah ini juga diklaim salah satu daerah perjuangan dakwah.

Demikian juga suku bangsa yang ada, selain pribumi dengan berbagai suku, ada non pri seperti India, Cina, Arab, Jepang, Eropah dan sebagainya. Oleh karenanya membicarakan kerukunan hidup umat beragama di tanah air kita tanpa membicarakan Kota Medan Sumatera Utara akan terasa belum lengkap. Itulah beberapa pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi masalah pokok penelitian ini adalah “bagaimana kerukunan hidup umat beragama di Medan yang merupakan syarat mutlak bagi tercapainya stabilitas demi kelancaran pembangunan”.

Dari masalah tersebut dapat dielaborasi ke dalam masalah-masalah yang lebih khusus yaitu :

1. Bagaimana pengenalan masyarakat terhadap kerukunan hidup umat beragama di kota Medan, baik secara pribadi maupun secara kelompok, baik masyarakat pinggir kota maupun di inti perkotaan.
2. Bagaimana kondisi trilogi kerukunan hidup umat beragama masyarakat Medan meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.
3. Apa kontribusi agama terhadap kegiatan pembangunan masyarakat pluralis di kota Medan

Dalam konteks penelitian ini kerukunan dilihat pertama dari asal kata “Rukun” (bahasa Arab) yang berarti asas atau dasar seperti rukun Islam berarti asas atau dasar Islam (Proyek Pemb.Keukunan Beragama,Dep.Agama, Agama dan masyarakat 1992 :7)

Sedangkan dalam kamus besar “Bahasa Indonesia” (Depdiknas 1986 :136) dijelaskan bahwa “Rukun” mempunyai dua arti yaitu rukun dengan arti, 1). Sesuatu yang dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan. 2). Asas, dasar, atau sendi. Sedangkan rukun sebagai ajektiva berarti. 1). Baik dan damai tidak bertentangan misal : Kita hendaknya rukun dalam bertetangga. 2). Bersatu hati, bersepakat, mis ; penduduk kampung itu rukun sekali. Kata rukun berarti juga perkumpulan yang berdasarkan tolong menolong dan persahabatan misal : rukun tetangga adalah perkumpulan orang-orang yang bertetangga, rukun tani, perkumpulan para petani.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun data yang diharapkan dapat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Apa yang menjadi indikator kuat atau lemahnya kerukunan hidup umat beragama terutama dari sudut prilakunya.
2. Bagaimana gambaran tentang tingkat kerukunan hidup beragama masyarakat Medan
3. Apa faktor pendukung terciptanya kerukunan hidup umat beragama dan apa pula faktor penyebab timbul konflik diantara lapisan masyarakat.
4. Untuk mengetahui sejauhmana nilai intern agama maupun ekstern agama dapat mempengaruhi kerukunan hidup umat beragama.

Penelitian ini selanjutnya diharapkan berguna;

- a. Sebagai bahan informasi yang menyeluruh tentang eksistensi dan pola-pola terbentuknya kerukunan hidup beragama yang pada gilirannya memperlancar proses pembangunan masyarakat plural yang inklusif.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam mengembangkan pembinaan kerukunan hidup umat beragama.

D. Kajian Pustaka dan Penelitian Sebelumnya.

Studi tentang kerukunan hidup umat beragama ini bersifat *historis sosiologis* dan budaya yang berkaitan dengan aspek keagamaan. Di Indonesia menurut Tarmizi Taher (1996 : 3), kajian kerukunan hidup beragama dimulai sejak zaman orde baru. Ketika umat beragama masih berhadapan dengan musuh bersama (*comunisme*) dengan konsep atheisnya yang merupakan ancaman serius terhadap kehidupan beragama, umat beragama dengan bersama tohoh agamanya dapat menjalin kerjasama bahu membahu dalam menumpas komunisme (PKI) di Indonesia. Namun begitu ancaman hilang dengan dibubarkannya "Partai Komunis Indonesia". Mulai muncul persaingan antar penganut agama dalam arena kehidupan lokal maupun nasional yang mengakibatkan timbulnya berbagai ketegangan antar kelompok agama, kerukunan semakin banyak terusik.

Sebuah tulisan terbaru dan cukup menarik ialah karya Prof.DR. H.M.Ridwan Lubis, Judul, Membangun Kehidupan Umat Beragama : Yang rukun, Demokratis dan bermakna (pengalaman Sumatera Utara), Juni 2003. Paparan dalam tulisan ini padat luas dan mendasar mencakup skop Sumatera Utara. Penelitian yang terfokus mengkaji kerukunan hidup umat beragama di Kota Medan terutama di era reformasi menurut penulis belum ada.oleh karena itulah penulis memilih judul Tesis ini " *Kerukunan Hidup Umat Beragama Pada Masyarakat Pluralis, Analisa Tentang Kontribusi Agama Terhadap Pembangunan Di Kota Medan.*

E. **Methode Penelitian**

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang mengangkat Topik "Kerukunan Hidup Umat Beragama pada Masyarakat Pluralis dan Kontribusi Agama Terhadap Kelancaran Pembangunan di Medan", maka lokasi penelitian adalah Kota Medan. Mengingat keadaan geografis dan demografi kota ini begitu kompleks maka penelitian ini sesuai dengan permasalahannya melalui pengamatan diarahkan kepada pengamatan masalah kerukunan sosial umat beragama. Dengan mudah akan dapat diketahui bahwa masalah kerukunan akan lebih berarti jika diamati di daerah yang kemungkinan interaksi penduduknya cenderung tinggi. Dari dua puluh satu Kecamatan yang ada di Kota Medan kemungkinan interaksi yang tinggi akan dijumpai di daerah kecamatan tertentu, sehingga penelitian ini mengambil lokasi tertentu di Kota Medan yakni, Kecamatan Medan Timur (yang sudah lama ada), dan Kecamatan Medan Tembung (kecamatan yang relatif baru).

2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua umat beragama yang ada di Kota Medan meliputi umat Islam, umat Kristen Protestan, umat Katolik, umat Hindu dan umat Budha. Umat beragama semua hampir dijumpai tersebar di dua puluh satu Kecamatan yang ada di Kota Medan. Dari Kecamatan yang ada tersebut dapat di bedakan pada Kecamatan yang sudah lama dibentuk dan ada pula yang bersifat Kecamatan pengembangan / perluasan. Mengingat masalah waktu,

tenaga dan biaya, maka dari kecamatan yang ada ini diambil 2 Kecamatan yaitu : satu yang mewakili kecamatan yang sudah lama ada dan satu dari kecamatan yang merupakan pengembangan/perluasan. Dasar pertimbangan selanjutnya untuk memilih kecamatan terpilih adalah dijumpainya kelima jenis umat beragama dan mempunyai integrasi sosial yang dianggap dinamis. Untuk lebih jelasnya kecamatan terpilih adalah; pertama, Kecamatan Medan Timur, mewakili kecamatan yang sudah lama ada. Kedua, Kecamatan Medan Tembung mewakili Kecamatan pengembangan/perluasan.

Dari kedua kecamatan terpilih ini secara bertujuan atau "*purposive*" dipilihlah Kelurahan Indra Kasih dan Bantan Timur untuk Kecamatan Medan Tembung, serta Kelurahan Durian dan Sidodadi untuk Kecamatan Medan Timur. Dari segi demografi kedua Kelurahan terpilih ini mempunyai Kepala Keluarga (KK) yang hampir sama yaitu penduduk dewasanya masing-masing sekitar 5.000 orang perkelurahan. Dari penduduk dewasa ini diketahui mereka itu mempersatukan diri / mengelompokkan diri dalam bentuk umat beragama / jamaah (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha). Kelompok umat yang dewasa tersebutlah yang dijadikan sasaran penelitian dengan ditetapkan kuota sebanyak 60 orang/ umat beragama. mereka itulah didirikan sebagai sumber data penelitian. Penetapan kuota berdasar pertimbangan bertujuan yaitu jumlah seperti itulah yang rasional dapat dicapai untuk diteliti/ di beri instrumen penelitian.

3. Alat Pengumpulan Data.

Sebagai sudah disebutkan pada uraian sebelumnya sumber data penelitian ini adalah umat beragama dari kelima agama yang ada, baik secara perorangan maupun yang mengorganisasikan diri dalam bentuk jamaah mesjid untuk yang beragama Islam, jamaah Gereja untuk yang beragama Kristen, Jamaah Kuil untuk yang berjamaah Hindu dan Jamah Vihara bagi yang beragama Budha. Disamping itu para pejabat dari Kantor Departemen Agama Medan di jadikan juga sebagai sumber data, yaitu Kasi Agama Islam, Kepala Seksi Urusan Kristen Protestan, Bimbingan Masyarakat Katolik, Bimbingan Masyarakat Agama Hindu. Untuk melengkapi kedua sumber ini digunakan juga data yang berasal dari

bahan tertulis dari forum dialog pemuka agama yang diadakan di Medan diantaranya :

1. Musyawarah Cendekiawan Pemuka Agama Sumatera Utara, tanggal 7 Pebruari 1994 di Medan.
2. Musyawarah antar pemuka agama se Sumatera bagian Utara tanggal 1 Januari 1995 di Medan.

Untuk responden jamaah umat beragama yang digunakan adalah angket yang umumnya berbentuk tertutup. Untuk responden kepala seksi urusan agama pada Kantor Departemen Agama, tokoh – tokoh agama digunakan wawancara dan pengamatan. Sedangkan untuk melengkapi data digunakan informan kunci dari tokoh agama yang lima.

d. Pengelolaan Data

Data yang bersumber dari kuesioner direncanakan yang dapat dihimpun dan diolah adalah sebanyak 60 orang, terdiri dari yang beragama Islam, 25 orang, untuk yang beragama Kristen Protestan/Katolik 20 orang, dan yang beragama Hindu dan Budha 15 orang.

Data yang diperoleh dengan kuesioner diolah melalui tabulasi untuk seterusnya dijadikan tabel frekuensi dan untuk melihat keberartian data beberapa tabel frekuensi digabungkan penyajiannya dalam suatu tabel atau dalam bentuk sajian grafik.

Data yang bersumber dari wawancara melalui proses seleksi, klasifikasi dan pengelompokan untuk kemudian dianalisis untuk diberi penafsiran/interpretasi.

Data yang berasal dari pengamatan dan dari informan diolah mirip dengan data wawancara. Kesemua data ini untuk memperkuat keberartiannya dikombinasikan /konfronkan dengan data kedua.

e. Teknik Analisis Data.

Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian seperti di atas setelah melalui proses pengelolaan seperti yang diuraikan sebelumnya, dianalisis baik secara statistik deskriptif maupun secara kualitatif.

F. Sistematika Pembahasan

Thesis ini ditulis dalam enam bab dan beberapa pasal, dan sistematika pembahasannya selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, Kerukunan Hidup Beragama, Identifikasi Masalah dan dijelaskan apa tujuan dan kegunaanya.

Bab kedua, Gambaran umum objek penelitian, yaitu meliputi geografis dan demografis Kota Medan, dijelaskan pula sarana dan prasarana keagamaan dan bagaimana kehidupan beragama masyarakatnya.

Bab ketiga, Tinjauan Teoritis tentang kerukunan hidup umat beragama, dijelaskan pula kerukunan sebagai amanah secara normatif dari setiap agama, pesan-pesan agama tentang perlunya membina kerukunan hidup beragama. dalam bab ini dijelaskan pula pengertian musyawarah dan dialog antar umat beragama.

Bab keempat, Kerukunan hidup umat beragama dan kelancaran pembangunan pada masyarakat pluralis, akan diungkapkan data lapangan tentang pengenalan-pengenalan masyarakat makna kerukunan dan konflik, dijelaskan pula sumber informasi kerukunan diterima oleh masyarakat, corak kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan corak kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Berikut diuraikan faktor pendorong dan penghambat kerukunan.

Bab kelima, Menjelaskan dampak kerukunan hidup umat beragama dan ajaran agama terhadap pembangunan baik aspek fisik maupun moral / etik.

Bab keenam, Mengambil kesimpulan dan saran yang dianggap penting yang dapat digunakan sebagai dasar pijakan para pengambil kebijakan maupun para pemerhati masalah kerukunan umumnya.